



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Desa.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) bagi Desa yang ADD nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) bagi Desa yang ADD nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari jumlah ADD yang diterima;
 - b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka dapat digunakan untuk belanja operasional pemerintahan Desa dan belanja pembangunan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterimakan pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa yang jumlah penduduk Desanya:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Desa yang jumlah penduduk Desanya:
 1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.785.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga

- delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa yang jumlah penduduk Desanya:
1. kurang dari atau sama dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) maksimal memperoleh Rp. 1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 3. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa maksimal memperoleh Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap mendapatkan tunjangan sesuai dengan jabatan definitifnya.

- (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tunjangan Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 5% dari penghasilan tetap dengan rincian pembebanan sebagai berikut:
 - a. 3% (tiga persen) ditanggung oleh Pemerintah Desa yang diambilkan dari ADD;
 - b. 2% (dua persen) ditanggung oleh peserta.

Bagian Keempat
Biaya Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 7

- (1) Biaya operasional BPD ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya.
- (2) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. RT dan RW sebesar 15% (lima belas persen) dari belanja lainnya;
 - b. PKK sebesar 7% (tujuh persen) dari belanja lainnya;
 - c. LPMD sebesar 5% (lima persen) dari belanja lainnya
 - d. Karang Taruna sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya;
 - e. Linmas sebesar 2% (dua persen) dari belanja lainnya.

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PENGALOKASIAN ADD TAHUN ANGGARAN 2016

1. Besar Dana

Besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 adalah Rp. 82.460.039.000,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum;
- ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- besarnya ADD memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang sebesar Rp. 38.453.220.000,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- besarnya belanja lainnya adalah Pagu anggaran dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp. 44.006.819.000,- (empat puluh empat milyar enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
- besarnya jumlah belanja lainnya masing-masing Desa di hitung dengan asas merata dan adil, maka jumlah belanja lainnya merata untuk masing-masing Desa adalah 70 % dari Rp. 44.006.819.000 = Rp. 30.804.773.300,- selanjutnya dibagi 287 Desa, sehingga besaran belanja lainnya merata tiap-tiap Desa adalah Rp. 107.333.704,878,-
- sedangkan belanja lainnya proporsional untuk masing-masing Desa sebesar 30% dari Rp. 44.006.819.000,- = Rp. 13.202.045.700 (tiga belas milyar dua ratus dua juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing Desa (nilai yang membedakan antara Desa satu dengan Desa yang lain);
- bagian belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel kemiskinan, jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Bagian Kelima
Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa

- (1) Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa diprioritaskan untuk pengadaan sarana mobilitas.
- (2) Biaya pengadaan sarana mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sisa lebih perhitungan Anggaran ADD Tahun 2015 dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.


Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI REMBANG


H. ABDUL HAFIDZ



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 5

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEJABAT | PARAF |
| SEKDA |  |
| ASISTEN I |  |

Bagian Kelima
Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa

- (1) Sarana dan prasarana operasional Pemerintah Desa diprioritaskan untuk pengadaan sarana mobilitas.
- (2) Biaya pengadaan sarana mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

BAB V

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 8

Pengalokasian ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sisa lebih perhitungan Anggaran ADD Tahun 2015 dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

4. Pembobotan Belanja Lainnya Proporsional.
Besarnya belanja lainnya proporsional dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel yang meliputi :
- indikator yang digunakan untuk menghitung ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - jumlah penduduk
 - luas wilayah
 - kemiskinan
 - tingkat kesulitan geografis
 - pembobotan variabel tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - jumlah penduduk : dengan angka bobot 40%;
 - luas wilayah : dengan angka bobot 30%;
 - kemiskinan : dengan angka bobot 20%;
 - tingkat kesulitan geografis : dengan angka bobot 10%.
5. JUMLAH ADD MASING-MASING DESA
Jumlah ADD yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan perhitungan diatas adalah sebagai berikut :

| KECAMATAN | NO | DESA | ADD YANG DITERIMA |
|-----------|----|----------------|-------------------|
| 1.SUMBER | 1 | Ronggomulyo | 295.603.000 |
| | 2 | Logede | 427.089.000 |
| | 3 | Pelemsari | 263.698.000 |
| | 4 | Logung | 250.447.000 |
| | 5 | Krikilan | 314.595.000 |
| | 6 | Kedungtulup | 209.448.000 |
| | 7 | Polbayem | 265.169.000 |
| | 8 | Jatihadi | 347.028.000 |
| | 9 | Sumber | 416.180.000 |
| | 10 | Jadi | 264.092.000 |
| | 11 | Grawan | 294.227.000 |
| | 12 | Randuagung | 321.142.000 |
| | 13 | Sukorejo | 311.188.000 |
| | 14 | Tlogotunggal | 424.060.000 |
| | 15 | Bogorejo | 290.328.000 |
| | 16 | Megulung | 219.808.000 |
| | 17 | Kedungasem | 276.285.000 |
| | 18 | Sekarsari | 454.811.000 |
| 2.BULU | 1 | Mlatirejo | 231.246.000 |
| | 2 | Sendangmulyo | 392.998.000 |
| | 3 | Pondokrejo | 238.381.000 |
| | 4 | Warugunung | 219.247.000 |
| | 5 | Pingganejo | 256.929.000 |
| | 6 | Cabeankidul | 234.733.000 |
| | 7 | Lambangankulon | 239.051.000 |
| | 8 | Lambanganwetan | 220.713.000 |
| | 9 | Sumbermulyo | 242.570.000 |
| | 10 | Karangasem | 293.883.000 |

| | | | |
|------------------|----|--------------|-------------|
| | 11 | Pasedan | 443.425.000 |
| | 12 | Ngulaan | 252.623.000 |
| | 13 | Jukung | 296.497.000 |
| | 14 | Bulu | 211.260.000 |
| | 15 | Mantingan | 327.856.000 |
| | 16 | Kadiwono | 253.114.000 |
| | | | |
| 3. GUNEM | 1 | Kajar | 305.021.000 |
| | 2 | Timbrangan | 253.232.000 |
| | 3 | Tegaldowo | 462.808.000 |
| | 4 | Pasucen | 241.484.000 |
| | 5 | Suntri | 231.862.000 |
| | 6 | Dowan | 310.444.000 |
| | 7 | Trembes | 258.882.000 |
| | 8 | Gunem | 282.315.000 |
| | 9 | Kulutan | 219.437.000 |
| | 10 | Sidomulyo | 278.232.000 |
| | 11 | Telgawah | 192.614.000 |
| | 12 | Sendangmulyo | 251.658.000 |
| | 13 | Panohan | 237.734.000 |
| | 14 | Demaan | 243.649.000 |
| | 15 | Banyuurip | 260.886.000 |
| | 16 | Sambongpayak | 200.432.000 |
| | | | |
| 4. SALE | 1 | Bancang | 304.180.000 |
| | 2 | Mrayun | 372.890.000 |
| | 3 | Ngajaran | 289.826.000 |
| | 4 | Tahunan | 523.656.000 |
| | 5 | Gading | 315.579.000 |
| | 6 | Jinanten | 307.715.000 |
| | 7 | Joho | 212.672.000 |
| | 8 | Sale | 394.859.000 |
| | 9 | Wonokerto | 428.075.000 |
| | 10 | Sumbermulyo | 318.310.000 |
| | 11 | Tengger | 401.757.000 |
| | 12 | Bitingan | 297.127.000 |
| | 13 | Pakis | 247.998.000 |
| | 14 | Rendeng | 248.927.000 |
| | 15 | Ukir | 322.765.000 |
| | | | |
| 5. SARANG | 1 | Lodankulon | 379.820.000 |
| | 2 | Lodanwetan | 368.316.000 |
| | 3 | Bonjor | 366.442.000 |
| | 4 | Tawangrejo | 261.228.000 |
| | 5 | Sampung | 335.735.000 |
| | 6 | Baturno | 278.032.000 |
| | 7 | Babaktulung | 355.296.000 |
| | 8 | Nglojo | 284.142.000 |
| | 9 | Jambangan | 279.223.000 |

| | | | |
|------------|----|--------------|-------------|
| | 10 | Pelang | 273.656.000 |
| | 11 | Gilis | 378.861.000 |
| | 12 | Gunungmulyo | 285.318.000 |
| | 13 | Gonggang | 248.542.000 |
| | 14 | Sumbermulyo | 322.652.000 |
| | 15 | Kalipang | 420.656.000 |
| | 16 | Dadapmulyo | 299.480.000 |
| | 17 | Sendangmulyo | 330.748.000 |
| | 18 | Banowan | 249.720.000 |
| | 19 | Temperak | 228.409.000 |
| | 20 | Karangmangu | 353.729.000 |
| | 21 | Bajingjowo | 221.345.000 |
| | 22 | Bajingmeduro | 283.283.000 |
| | 23 | Sarangmeduro | 329.523.000 |
| | | | |
| 6. SEDAN | 1 | Ngulahan | 232.071.000 |
| | 2 | Pacing | 355.128.000 |
| | 3 | Karas | 379.876.000 |
| | 4 | Mojosari | 417.024.000 |
| | 5 | Gesikan | 225.099.000 |
| | 6 | Sambiroto | 256.694.000 |
| | 7 | Sedan | 376.892.000 |
| | 8 | Karangasem | 288.310.000 |
| | 9 | Sidorejo | 398.917.000 |
| | 10 | Sidomulyo | 371.787.000 |
| | 11 | Kedungringin | 377.034.000 |
| | 12 | Gandrirojo | 318.991.000 |
| | 13 | Candimulyo | 339.591.000 |
| | 14 | Lemahputih | 243.218.000 |
| | 15 | Kumbo | 294.891.000 |
| | 16 | Dadapan | 429.599.000 |
| | 17 | Sambong | 309.475.000 |
| | 18 | Bogorejo | 290.525.000 |
| | 19 | Kenongo | 298.405.000 |
| | 20 | Jambeyan | 244.808.000 |
| | 21 | Menoro | 377.786.000 |
| | | | |
| 7. PAMOTAN | 1 | Megal | 261.852.000 |
| | 2 | Ngemplakrejo | 275.963.000 |
| | 3 | Pragen | 288.940.000 |
| | 4 | Samaran | 266.890.000 |
| | 5 | Gambiran | 325.571.000 |
| | 6 | Bamban | 275.040.000 |
| | 7 | Bangunrejo | 331.847.000 |
| | 8 | Pamotan | 445.099.000 |
| | 9 | Sidorejo | 299.378.000 |
| | 10 | Tempaling | 278.173.000 |
| | 11 | Joho | 278.162.000 |
| | 12 | Mlagen | 278.217.000 |

| | | | |
|------------|----|--------------|-------------|
| | 13 | Kepohagung | 298.681.000 |
| | 14 | Mlawat | 240.606.000 |
| | 15 | Segoromulyo | 332.575.000 |
| | 16 | Ketangi | 262.085.000 |
| | 17 | Sendangagung | 323.009.000 |
| | 18 | Gegersimo | 249.327.000 |
| | 19 | Sumberejo | 324.104.000 |
| | 20 | Japerejo | 290.862.000 |
| | 21 | Tulung | 261.839.000 |
| | 22 | Ringin | 307.203.000 |
| | 23 | Sumbangrejo | 274.948.000 |
| | | | |
| 8. SULANG | 1 | Tanjung | 253.950.000 |
| | 2 | Kemadu | 295.315.000 |
| | 3 | Sulang | 379.646.000 |
| | 4 | Pomahan | 270.156.000 |
| | 5 | Rukem | 299.069.000 |
| | 6 | Korowelang | 274.990.000 |
| | 7 | Karangharjo | 290.204.000 |
| | 8 | Jatimudo | 263.201.000 |
| | 9 | Kunir | 362.196.000 |
| | 10 | Glebeg | 309.192.000 |
| | 11 | Bogorame | 245.743.000 |
| | 12 | Kaliombo | 355.539.000 |
| | 13 | Sudo | 307.484.000 |
| | 14 | Karangsari | 293.949.000 |
| | 15 | Pragu | 219.950.000 |
| | 16 | Kebonagung | 203.788.000 |
| | 17 | Seren | 344.051.000 |
| | 18 | Pranti | 262.566.000 |
| | 19 | Pedak | 322.925.000 |
| | 20 | Landoh | 271.543.000 |
| | 21 | Kerep | 284.379.000 |
| | | | |
| 9. KALIORI | 1 | Meteseh | 252.654.000 |
| | 2 | Maguan | 254.573.000 |
| | 3 | Wiroto | 327.220.000 |
| | 4 | Sidomulyo | 254.583.000 |
| | 5 | Banggi | 284.732.000 |
| | 6 | Kuangsan | 223.323.000 |
| | 7 | Gunungsari | 363.065.000 |
| | 8 | Sendangagung | 419.511.000 |
| | 9 | Karangsekar | 263.747.000 |
| | 10 | Babadan | 284.507.000 |
| | 11 | Pengkol | 272.500.000 |
| | 12 | Sambiyani | 293.686.000 |
| | 13 | Mojorembun | 265.344.000 |
| | 14 | Tunggulsari | 228.841.000 |
| | 15 | Tambakagung | 277.240.000 |

| | | | |
|-------------|----|----------------|-------------|
| | 16 | Mojowarno | 266.842.000 |
| | 17 | Dresikulon | 267.676.000 |
| | 18 | Dresiwetan | 267.377.000 |
| | 19 | Tasikharjo | 281.003.000 |
| | 20 | Purworejo | 253.262.000 |
| | 21 | Bogoharjo | 248.825.000 |
| | 22 | Banyudono | 194.577.000 |
| | 23 | Pantiharjo | 157.402.000 |
| | | | |
| 10. REMBANG | 1 | Kedungrejo | 336.129.000 |
| | 2 | Turusgede | 297.756.000 |
| | 3 | Kumendung | 244.685.000 |
| | 4 | Sridadi | 379.081.000 |
| | 5 | Pandean | 225.747.000 |
| | 6 | Tlogomojo | 264.589.000 |
| | 7 | Kasreman | 332.504.000 |
| | 8 | Punjulharjo | 315.035.000 |
| | 9 | Tritunggal | 228.214.000 |
| | 10 | Pasar Banggi | 328.438.000 |
| | 11 | Gedangan | 315.841.000 |
| | 12 | Weton | 226.775.000 |
| | 13 | Ngotet | 291.677.000 |
| | 14 | Mondoteko | 366.449.000 |
| | 15 | Ngadem | 231.498.000 |
| | 16 | Ketanggi | 265.193.000 |
| | 17 | Pulo | 274.684.000 |
| | 18 | Waru | 372.015.000 |
| | 19 | Gegunung Wetan | 219.610.000 |
| | 20 | Sumberjo | 367.054.000 |
| | 21 | Tasikagung | 232.964.000 |
| | 22 | Sawahan | 203.079.000 |
| | 23 | Padaran | 262.028.000 |
| | 24 | Sukoharjo | 219.699.000 |
| | 25 | Kabonganlor | 184.887.000 |
| | 26 | Kabongankidul | 296.760.000 |
| | 27 | Tireman | 262.332.000 |
| | | | |
| 11. PANCUR | 1 | Japeledok | 218.067.000 |
| | 2 | Jeruk | 255.532.000 |
| | 3 | Doropayung | 310.591.000 |
| | 4 | Karaskepoh | 199.579.000 |
| | 5 | Tuyuhan | 296.547.000 |
| | 6 | Pandan | 281.597.000 |
| | 7 | Gemblengmulyo | 297.915.000 |
| | 8 | Sumberagung | 249.467.000 |
| | 9 | Kalitengah | 325.834.000 |
| | 10 | Sidowayah | 234.943.000 |
| | 11 | Kedung | 220.371.000 |
| | 12 | Punggurharjo | 198.214.000 |

| | | | |
|------------|----|----------------|-------------|
| | 13 | Langkir | 229.499.000 |
| | 14 | Pancur | 361.349.000 |
| | 15 | Pohlandak | 228.757.000 |
| | 16 | Warugunung | 312.775.000 |
| | 17 | Criwik | 199.147.000 |
| | 18 | Wuwur | 262.700.000 |
| | 19 | Ngulangan | 179.094.000 |
| | 20 | Banyuurip | 218.426.000 |
| | 21 | Johogunung | 270.925.000 |
| | 22 | Trenggulunan | 254.685.000 |
| | 23 | Ngroto | 268.072.000 |
| | | | |
| 12. KRAGAN | 1 | Tanjungsari | 263.319.000 |
| | 2 | Sendangmulyo | 275.216.000 |
| | 3 | Sendangwaru | 322.405.000 |
| | 4 | Ngasinan | 274.882.000 |
| | 5 | Kendalagung | 258.297.000 |
| | 6 | Mojokerto | 262.427.000 |
| | 7 | Tanjungan | 267.927.000 |
| | 8 | Kebloran | 247.770.000 |
| | 9 | Karanganyar | 211.973.000 |
| | 10 | Karanglincak | 249.956.000 |
| | 11 | Karangharjo | 301.876.000 |
| | 12 | Kragan | 268.577.000 |
| | 13 | Tegalmulyo | 254.368.000 |
| | 14 | Balongmulyo | 277.409.000 |
| | 15 | Narukan | 214.343.000 |
| | 16 | Sudan | 182.793.000 |
| | 17 | Terjan | 307.334.000 |
| | 18 | Sendang | 190.584.000 |
| | 19 | Watupecah | 234.206.000 |
| | 20 | Woro | 410.340.000 |
| | 21 | Sumurpule | 301.743.000 |
| | 22 | Sumbergayam | 339.451.000 |
| | 23 | Plawangan | 278.605.000 |
| | 24 | Pandanganwetan | 255.911.000 |
| | 25 | Pandangankulon | 283.539.000 |
| | 26 | Sumurtawang | 312.908.000 |
| | 27 | Sumbersari | 238.304.000 |
| | | | |
| 13. SLUKE | 1 | Sanetan | 270.972.000 |
| | 2 | Rakitan | 215.148.000 |
| | 3 | Bendo | 308.818.000 |
| | 4 | Labuhankidul | 371.310.000 |
| | 5 | Sendangmulyo | 333.662.000 |
| | 6 | Blimbing | 168.190.000 |
| | 7 | Manggar | 322.982.000 |
| | 8 | Jatisari | 240.309.000 |
| | 9 | Langgar | 234.362.000 |

| | | | |
|-----------|----|--------------|-------------|
| | 10 | Sluke | 359.561.000 |
| | 11 | Jurangjero | 282.880.000 |
| | 12 | Leran | 255.936.000 |
| | 13 | Trahan | 277.221.000 |
| | 14 | Pangkalan | 241.914.000 |
| | | | |
| 14. LASEM | 1 | Karasgede | 299.104.000 |
| | 2 | Jolotundo | 333.915.000 |
| | 3 | Sumbergirang | 383.399.000 |
| | 4 | Karangturi | 256.449.000 |
| | 5 | Babagan | 256.070.000 |
| | 6 | Dorokandang | 263.718.000 |
| | 7 | Gedongmulyo | 342.489.000 |
| | 8 | Dasun | 201.072.000 |
| | 9 | Soditan | 302.082.000 |
| | 10 | Ngemplak | 261.940.000 |
| | 11 | Selopuro | 378.405.000 |
| | 12 | Sendangcoyo | 332.469.000 |
| | 13 | Ngargomulyo | 195.346.000 |
| | 14 | Kajar | 212.441.000 |
| | 15 | Gowak | 274.556.000 |
| | 16 | Sendangasri | 339.563.000 |
| | 17 | Tasiksono | 200.425.000 |
| | 18 | Sriombo | 241.990.000 |
| | 19 | Bonang | 244.833.000 |
| | 20 | Binangun | 291.512.000 |

BUPATI REMBANG,



H. ABDUL HAFIDZ